

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA DANA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DEWAN PERWAKILAN CABANG KABUPATEN BULELENG

I Gusti Ayu Ngurah Prasiska Dewi, Luh Alin Kristiani, Luh Putu Rida Cinthyani,
I Gusti Bagus Irvan Prasetya, Putu Surya Asti Ratama Putra

Jurusan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Buleleng, Bali

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi apa itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI); bagaimana sejarah berdirinya PSI; bagaimana penghimpunan dan pengelolaan dana di PSI DPC Kecamatan Buleleng; dan bagaimana kualifikasi sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola dana di PSI DPC Kecamatan Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSI dari segi organisasi pada dasarnya merupakan partai yang dibentuk oleh anak muda dan menghadirkan sebuah partai politik baru yang membawa harapan dan jalan perubahan yang nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pengelolaan sumber dana yang himpun untuk pengelolaan partai yaitu dana dari donasi, dana dari aktivitas operasional seperti penjualan atribut PSI seperti baju kaos dan asesoris.

Kata kunci: Kualitas sumber daya manusia; dana partai; partai solidaritas indonesia

Abstract

This research aims to investigate what the Indonesian Solidarity Party (PSI) is; how the history of the establishment of PSI; how to collect and manage funds in PSI DPC Buleleng District; and how to qualify for human resources (HR) as a fund manager in the DPC PSI Buleleng District. The results showed that PSI in terms of organization is basically a party formed by young people and presents a new political party that brings hope and a path of real change for the life of the nation and state. The management of pooled funds for management of party is funds from donations, funds from operational activities such as the sale of PSI attributes such as T-shirts and accessories.

Keywords: Quality of human resources; party funds; Indonesian Solidarity Party

1. Pendahuluan

Pasca reformasi perpolitikan di Indonesia mulai berkembang lagi, partai politik yang dulu tidak berdaya ketika berhadapan dengan penguasa mulai saat itu mulai menampakkan kekuatannya sebagai pengontrol jalannya kekuasaan. Sebenarnya, hal seperti ini pernah muncul di awal kemerdekaan sebagai buah dari revolusi panjang sebuah Negara dalam melawan penindasan kolonial. Euforia kebebasan politik waktu itu sangat tergambarkan oleh muncul banyak sekali partai politik dengan segala identitasnya. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu pertama merupakan pemilu yang paling demokratis, dengan banyaknya peserta pemilu dan asas jurdil (jujur dan adil) yang relatif bisa dipertanggung jawabkan karena penguasa belum mempunyai kekuasaan dalam mempengaruhi jalannya pesta demokrasi dan hal seperti ini yang pada saat sekarang menjadi persoalan tersendiri dimana penguasa masih dapat mempengaruhi proses pemilu, baik melalui mobilisasi pemilih untuk memilih partai penguasa, politik uang, permainan data pemilih, dan juga permainan dari penyelenggara pemilu sendiri dalam memenangkan pemilu.

Ada 10 permasalahan pendanaan Partai Politik menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW), yaitu: (1) partai politik (selanjutnya disingkat menjadi 'parpol') menerima sumbangan tertentu yang patut diduga berasal dari hasil korupsi dan tindak pidana lainnya, (2) parpol mengandalkan sumbangan hanya dari kader partai yang duduk di legislatif dan eksekutif, (3) parpol menerima sumbangan melebihi aturan namun tidak dicatat dalam pembukuan, (4) parpol tidak melakukan penggalangan donasi publik (*public fundraising*), (5) sumber pemasukan hanya diketahui segelintir elit partai, (6) pencatatan hanya dilakukan terhadap sumber keuangan yang berasal dari APBN/APBD, (7) pendanaan yang ilegal atau melebihi aturan tidak akan pernah dicatat, (8) hasil audit tidak disampaikan secara terbuka dan

transparan kepada publik, (9) parpol cenderung memiliki dua pembukuan, (10) mayoritas partai tidak melakukan konsolidasi laporan keuangan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merupakan partai yang baru berdiri pada 2014 dan merekrut anak-anak muda, perempuan, dan penggerak usaha untuk menjadi anggotanya. PSI melibatkan teknologi, inovasi, dan kreatifitas khas anak muda dalam beberapa program kerja yang dilakukan. Selain itu, PSI memiliki komitmen untuk menjadi partai yang dimiliki publik, bukan hanya milik segelintir orang, hal ini ditunjukkan dari dicetuskannya Kartu SAKTI.

Penerbitan kartu SAKTI (Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi) yang berfungsi sebagai uang elektronik untuk sumbangan dana oleh publik kepada partai dan pengakuan partisipasi pemegang kartu tersebut dalam menentukan arah kebijakan partai tanpa harus mengikutsertakan pemegang kartunya sebagai anggota partai namun juga tetap dapat berinteraksi dengan seluruh anggota partai dalam berbagi tingkatan.

Berdasarkan beberapa permasalahan pendanaan dan pengelolaan dana yang disampaikan oleh ICW di atas dan melihat geliat PSI dalam mengembangkan partai melalui program-program yang melibatkan kaum muda dalam pengelolaan partai, mendasari penulis untuk mengangkat topik tentang peran sumber daya manusia pengelolaan dana di PSI, khususnya pada lingkungan partai politik Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Cabang Kecamatan Buleleng dengan pertimbangan bahwa Provinsi Bali akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada 2018 dan PSI menjadi salah satu partai yang turut bergabung dengan tim pendukung salah satu Pasangan Calon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apa itu Partai Solidaritas Indonesia (PSI)?; Bagaimana sejarah berdirinya PSI? Bagaimana penghimpunan dan pengelolaan dana di PSI DPC Kecamatan Buleleng? Bagaimana kualifikasi sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola dana di PSI DPC Kecamatan Buleleng?

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Partai politik bukanlah seperti kebutuhan pokok. Fungsi utama (alasan keberadaan) partai politik bukan sebagai peserta pemilu dalam rangka mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, melainkan sebagai jembatan antara rakyat dengan negara. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kesertaan dalam pemilu merupakan salah satu upaya menjembatani rakyat dengan negara.

Partai politik baru menjadi kebutuhan jika partai politik itu berhasil menawarkan perubahan, kebahagiaan atau gagasan tentang masa depan yang lebih baik. Tanpa itu, partai politik hanya akan menjadi sekumpulan elit yang tidak berhubungan sama sekali dengan rakyat banyak. Maka dari itu, Partai Solidaritas Indonesia hadir untuk menyemai kembali hubungan tak terpisahkan antara partai politik dengan rakyat, juga membangun sebuah partai politik modern yang sejalan dengan kebutuhan jaman, serta menghadirkan karakter dan cara berpolitik yang baru.

Partai Solidaritas Indonesia (disingkat PSI) adalah partai politik di Indonesia yang baru didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita Grace Natalie. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan dan lintas agama. Tokoh-tokoh partai ini banyak mengajak warga negara muda untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.

Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat. Misi PSI adalah sebagai berikut:

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.
2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.
3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme,

mendirikan kembali benteng-benteng kebhinnekaan dan membangun kembali pondasi gotong royong.

4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik internasional yang sedang berkembang.

PSI sebagai partai baru yang konsisten merekrut pengurusnya yang bukan bagian dari partai politik lama tidak punya ketersambungan dengan kekuatan politik lama. Dengan demikian PSI bisa secara konsisten melakukan gerakan politik yang sama sekali baru tanpa harus tersandera dengan kepentingan politik lama, klientalisme, rekam jejak yang buruk, beban sejarah dan citra yang buruk terhadap partai politik sebelumnya. PSI jelas memberikan porsi yang besar pada perempuan, sehingga gerakan politik PSI tidak hanya sekedar memenuhi syarat 30% persen perempuan, tapi juga seluruh keputusan politiknya diambil melalui keterlibatan aktif perempuan di dalamnya.

PSI secara konsisten memisahkan antara dua hal yang selama ini kadang menjadi kabur, antara mengurus partai dan mengurus politik. Sejak awal PSI telah memisahkan struktur politik dengan struktur administratifnya. Tidak akan terjadi politisi mengurus administrasi partai lalu menggunakannya untuk kepentingan kekuasaan, karena partai akan diurus oleh orang-orang muda profesional yang paham betul bagaimana mengurus organisasi yang moderen, professional, bersih dan transparan.

2.2 Sejarah Berdirinya PSI

PSI berawal dari obrolan santai tapi berkualitas dan visioner lima anak muda di sebuah kafe di bilangan Jakarta Selatan pada akhir 2014. Obrolan ini menjadi awal cikal bakal terbentuknya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) didirikan pada tanggal 16 November 2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmiko, SH No. 14 tahun 2014. Pada tanggal 16 Desember, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Melengkapi syarat-syarat pembentukan parpol inilah yang menjadi 'tugas suci' pengurus PSI di semua level kepemimpinan guna memastikan PSI lolos verifikasi Kumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016.

Partai Solidaritas Indonesia berlambangkan segi empat merah dengan gambar kepalan tangan mengenggam bunga mawar berwarna putih, bertuliskan PSI dengan huruf P yang terbuka. Arti lambang Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan kesetiaan, solidaritas dan kekuatan.
2. Tulisan PSI merupakan singkatan dari partai solidaritas Indonesia. Dengan huruf P yang terbuka, menunjukkan PSI adalah partai terbuka.
3. Bunga mawar putih adalah lambang solidaritas internasional dengan gagasan demokrasi substantive yang juga termasuk dalam UUD 1945.
4. Lima kelopak luar melambangkan Pancasila dan Tiga kelopak dalam menunjukkan Trisakti
5. Kepalan tangan putih melambangkan tekad yang suci, optimis, pantang menyerah dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa.
6. Warna merah sebagai latar belakang menunjukkan bahwa PSI selalu berani dalam setiap gerakan politiknya, tanpa pernah gentar pada siapapun yang coba menghalangi cita-cita bangsa Indonesia. Ide bunga mawar ini terinspirasi dari kutipan pidato Soekarno tanggal 29 Juli 1956 di Semarang "Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya.

Target PSI secara organisasi menghadirkan sebuah partai politik baru yang membawa harapan dan jalan perubahan yang nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu target ideal itu hanya diwujudkan jika PSI bisa membangun struktur di

seluruh wilayah administratif Republik Indonesia, dari Pusat hingga RT. Kehadiran struktur PSI hingga tingkatan administratif terkecil akan memudahkan PSI untuk menyerap aspirasi dan kepentingan warga di seluruh Indonesia, sehingga PSI bisa hadir seiring dengan denyut kehidupan warga negara. Setelah pembangunan struktur organisasi yang passif, maka PSI akan segera berpartisipasi dalam proses Pemilihan umum di setiap tingkatan untuk memastikan cita-cita PSI yang diserap dari seluruh lapisan rakyat Indonesia bisa diperjuangkan melalui sebuah proses politik negara. Baik di eksekutif, yudikatif dan legislatif.

2.3 Penghimpunan dan Pengelolaan Dana di PSI DPC Kecamatan Buleleng

Tantangan besar bagi partai politik dalam menjalankan fungsi-fungsi politiknya adalah pengelolaan keuangan partai. Menjalankan fungsi tersebut tidak semata terkait manajemen, sumber daya manusia, transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas, namun juga sumber-sumber keuangan yang dapat dieksplorasi oleh partai politik dan pentingnya pengaturan negara atas keuangan partai politik. Pottie (2003:12) mengelompokkan sumber keuangan partai politik terdiri dari : (1) Negara (public funding) yang dapat dialokasikan secara tahunan atau hanya dialokasikan dalam kampanye pemilihan; (2) Kalangan swasta (private funding) yang diatur sumber pendapatan dan pengeluarannya; dan (3) Dana tidak sah (illegitimate funding). Sedangkan Pramono (2011: 49) mengelompokkan sumber dana partai politik terdiri dari : (1) Internal partai, seperti iuran anggota, sumbangan dari kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif atau eksekutif, dan badan usaha yang didirikan oleh partai; (2) Kalangan swasta (private funding), seperti sumbangan dari individu, badan usaha swasta, organisasi, dan kelompok masyarakat; dan (3) Negara (public funding), yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dewasa ini, dana yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan fungsi.

Untuk pengendalian keuangan partai politik, dua pendekatan perlu dilakukan sekaligus, yaitu pendekatan regulasi dan subsidi keuangan dari negara. Yang dimaksud dengan pendekatan regulasi tidak saja berupa pengaturan keuangan partai politik yang menjamin kepastian hukum, tetapi juga adanya lembaga independen dengan kewenangan yang jelas untuk menegakkan regulasi tersebut secara konsisten dengan sanksi yang efektif. Subsidi keuangan dari negara diberikan kepada partai politik tidak saja karena partai politik merupakan badan publik yang diberi tugas dan kewenangan publik, tetapi hal itu juga untuk mencegah pihak swasta "membeli" kebijakan publik yang dibuat oleh kader partai yang duduk dalam lembaga pemerintahan. Kedua pendekatan ini perlu dilakukan sekaligus karena regulasi saja tidak akan mampu mengendalikan perilaku menyimpang partai politik dalam hal dana. Hal ini tidak lain karena partai politik secara nyata memerlukan dana yang cukup besar, tetapi partai tidak memiliki sumber penerimaan yang memadai. Karena itu, di samping regulasi, partai politik perlu diberi dana publik. Akan tetapi dana publik yang diberikan kepada partai harus disertai tujuan yang jelas, seperti mendorong partai politik melaksanakan fungsinya sebagai agen demokrasi, menciptakan persaingan yang adil antarpolitical, serta mendorong partai mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Sejumlah prinsip berikut perlu dipertimbangkan dalam mengatur keuangan

Partai Solidaritas Indonesia pada dasarnya merupakan partai yang dibentuk oleh anak muda. Hal ini nampak dalam proses pembentukan pengurus partai, dalam semua tingkatan partai, yang berpedoman pada kebijakan yang mengharuskan pengurus berusia antara 17-45 tahun, hal ini dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Meskipun terdapat peraturan batasan usia sebagai kualifikasi pengurus partai namun masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota diperbolehkan dari segala umur dan bukan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau petugas militer. Selain itu juga, calon anggota seharusnya belum pernah aktif di partai politik lain. Hingga saat ini, jumlah anggota PSI di Kecamatan Buleleng telah mencapai 900 orang lebih. Anggota

DPC PSI Kecamatan Buleleng didominasi dari kalangan dari pelajar, mahasiswa namun tidak sedikit juga para lanjut usia (lansia) yang turut bergabung.

Struktur kepengurusan DPC PSI Kecamatan Buleleng terdiri atas ketua yaitu Kusuma Surya Dharmawia yang sekaligus merupakan narasumber pada mini-riset ini, Sekretaris dan Bendahara yaitu Ni Luh Pariadi. Pengelolaan dana pada partai di DPC Kecamatan Buleleng sepenuhnya di kelola oleh bendahara.

Sumber dana DPC PSI Kecamatan Buleleng berasal sumber-sumber sebagai berikut:

1. Dana pribadi masing-masing anggota dan pengurus yang dapat berupa patungan/*urunan*
2. Hasil penjualan merchandise khas PSI
3. Donasi dari masyarakat
4. Donasi masyarakat melalui Kartu SAKTI

Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi (Kartu SAKTI) merupakan suatu tanda resmi yang dikeluarkan partai kepada donator yang menyumbangkan uangnya untuk PSI, minimal Rp. 25.000,- dan tidak ada batasan tertinggi, sebagai wujud komitmen bahwa PSI adalah partai yang dimiliki publik bukan hanya segelintir orang. Selain berfungsi sebagai uang elektronik ada banyak manfaat lainnya. Manfaat utama kartu ini adalah pemilik ikut menentukan arah kebijakan partai, bisa memantau dan menilai kader PSI yang menjadi pejabat publik dan berhak berinteraksi dengan pengurus PSI di semua level.

Namun, pemilik kartu SAKTI tidak secara otomatis menjadi anggota PSI, kartu SAKTI ini dapat dipesan melalui DPC terdekat maupun melalui alamat website <https://teman.psi.id/kartusakti/>.

5. Dana dari sponsor

Banyak pengusaha yang mensponsori khususnya di DPC Kec.Buleleng karena mereka lihat semangat anak muda yang tinggi untuk mengubah cara berpolitik yang salah.

Penggunaan dana partai kebanyakan diarahkan untuk kegiatan sosial yang bermuara pada masyarakat yang memerlukan. Di DPC PSI Kecamatan Buleleng, pengurus atau anggota tidak mendapat imbalan apapun sehingga seluruh kerja mereka memang berlandaskan atas pengabdian. Penggunaan dana lainnya adalah kegiatan rapat anggota, kegiatan sosial, seperti bersih pantai, serta pembuatan atribut partai.

2.4 Kualifikasi sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola dana di PSI DPC Kecamatan Buleleng

Partai politik memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan berbagai fungsinya. Kampanye pemilu yang berhasil, misalnya, tergantung pada komunikasi dan komunikasi memerlukan dana dalam jumlah besar. Akan tetapi banyak pihak menilai bahwa uang memiliki potensi merusak partai/kandidat dan mendorong partai atau kandidat untuk lebih melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan umum. Sumbangan yang begitu besar diterima oleh partai atau kandidat dari kalangan tertentu akan dapat membeli atau menentukan suara yang diambil partai atau wakil rakyat dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif dan atau eksekutif. Secara obyektif partai politik dalam sistem politik demokrasi memerlukan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan fungsinya (*money is necessary for political processes in democracy*) (Surbakti, 2011). Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar paham serta jujur dalam pengelolaan keuangan partai politik tersebut.

Kuangan partai politik sangat perlu pengaturan yang tepat. Sebelum menawarkan berbagai bentuk pengaturan keuangan partai politik, terlebih dahulu perlu ditetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan tersebut. Jenis dan bentuk regulasi keuangan partai politik ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai. Setidaknya terdapat 10 tujuan yang dapat dicapai oleh regulasi keuangan partai politik.

1. Menjamin persaingan yang sehat dan adil antar-P4 atau dalam bahasa negatif, mencegah dominasi satu P4 dalam kampanye pemilu.

2. Menjamin informasi yang beragam (visi, misi, dan program) dari banyak P4 yang sampai kepada pemilih atau mencegah monopoli informasi dari satu P4 kepada pemilih.
3. Menjamin partai/calon yang baik (antara lain memiliki program yang tepat untuk masalah bangsa, kader yang berintegritas dan memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan masalah bangsa), 55 tetapi tidak memiliki dana dalam jumlah yang memadai untuk tampil menjadi peserta pemilu. Dengan demikian, tidak saja para pemilih memiliki alternatif pilihan yang baik, tetapi kondisi ini juga akan menguntungkan bangsa dan negara.
4. Mencegah partai/calon terpilih didikte oleh penyumbang dana terbesar atau oleh pihak asing atau menjamin agar partai/calon terpilih lebih berorientasi pada dan akuntabel kepada konstituen.
5. Memberdayakan pemilih agar memberikan suara kepada partai/ calon dari segi transparansi penerimaan dan pengeluaran P4. Dengan mengetahui siapa yang menyumbang berapa, untuk partai apa atau calon yang mana, para pemilih dapat menilai sendiri tentang sumber keuangan yang dia pandang wajar/dapat diterima dan karena itu memberikan suara berdasarkan pertimbangan tersebut.
6. Menjaga martabat pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat atau mencegah pengaruh uang atau bentuk materi lainnya terhadap pilihan pemilih ketika memberikan suara.
7. Memperkuat partai politik sebagai aktor demokrasi yang efektif dengan memberikan dana kepada P4 yang mendapat dukungan dari anggota, yang melakukan pendidikan politik kepada anggota, dan yang melakukan kaderisasi kepada anggota sehingga tersedia calon pemimpin yang cakap dalam jumlah yang memadai.
8. Memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik kepada partai politik melalui pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
9. Mencegah potensi korupsi, praktik korupsi dan kesan korupsi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara.
10. Menjaga integritas proses dan hasil pemilu.

Untuk mencapai tujuan regulasi keuangan, selain pengurus bagian keuangan partai politik yang mendukung, semua anggota atau bagian dari partai politik tersebut juga semestinya ikut berpartisipasi agar 10 tujuan tersebut bisa direalisasikan. Maka dari itu diperlukan kualifikasi-kualifikasi sumber daya manusia yang mendukung dalam organisasi partai politik tersebut.

Ketua DPC PSI Kecamatan Buleleng yaitu Kusuma Surya Dharmawia, seorang mahasiswa aktif di Universitas Pendidikan Ganesha, dan bendahara yang bernama Ni Luh Pariadi, seorang lulusan SMA yang berusia 35 tahun.

Menurut narasumber, perekrutan pengurus tidak hanya mementingkan latar belakang pendidikan kandidat. Namun yang lebih dipentingkan adalah niat dan komitmen kandidat untuk mengabdikan pada partai. Perekrutan tidak dilangsungkan melalui seleksi ketat namun melalui penunjukan/surat rekomendasi langsung dari ketua kepada masing-masing level organisasi.

3. Simpulan dan Saran

PSI dari segi organisasi pada dasarnya merupakan partai yang dibentuk oleh anak muda dan menghadirkan sebuah partai politik baru yang membawa harapan dan jalan perubahan yang nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pengelolaan sumber dana yang himpun untuk pengelolaan partai yaitu dana dari donasi, dana dari aktivitas operasional seperti penjualan atribut PSI seperti baju kaos dan asesoris. Selain itu PSI juga mendapatkan sumber dana dari Kartu Solidaritas Anti Korupsi dan Intoleransi (Kartu SAKTI) merupakan suatu tanda resmi yang dikeluarkan partai kepada donator yang menyumbangkan uangnya untuk PSI, minimal Rp. 25.000,- dan tidak ada batasan tertinggi, sebagai wujud komitmen bahwa PSI adalah partai yang dimiliki publik bukan hanya segelintir orang. Manfaat utama kartu ini adalah pemilik ikut menentukan arah kebijakan partai, bisa memantau dan menilai kader PSI yang menjadi pejabat publik dan berhak berinteraksi

dengan pengurus PSI di semua level. Namun, pemilik kartu SAKTI tidak secara otomatis menjadi anggota PSI. Dari segi pengelolaan sumber daya manusia PSI tidak telalu mempehitungkan latar belakang ataupun pendidikan menurut narasumber pengurus PSI di landaskan atas dasar kepercayaan dan rasa tanggung jawab.

Dari penulisan makalah ini, saran yang dapat diberikan penulis adalah untuk tetap memperbaiki citra partai politik sebagai institusi demokrasi maka partai politik disarankan agar lebih memperhatikan mutu partainya terlebih dahulu kemudian memikirkan masyarakat sebelum memperebutkan kursi kekuasaan. Selain itu, kontribusi masyarakat juga sangat diperlukan untuk memperbaiki citra partai politik yang terkadang terdengar sebagai konotasi yang negative. Maka dari itu, masyarakat utamanya kaum pemuda sebagai tunas bangsa hendaknya berkontribusi lebih untuk mengembangkan agar partai politik di Indonesia semakin lebih baik. dengan adanya PSI ini diharapkan dapat mewedahi dan mewujudkan aspirasi kaum muda Indonesia untuk citra partai politik yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC Partai Solidaritas Indonesia tersedia pada PSI.OR.ID diakses pada 2 Juni 2018
- Budiarsana, I Made Raka. 2016. *Strategi Memaksimalkan Efektivitas Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas X dalam Mencegah Fraud Untuk Mewujudkan Good University Governance (GUG)*. Singaraja. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Volume 6, Nomor 1, Desember 2016
- Gabrillin, Abba. 2016. Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Kemenkumham. Tersedia pada Kompas.com. Diakses pada 2 Juni 2018
<https://teman.psi.id/kartusakti/>
- PSI. 2018. Pembentukan Partai PSI Berawal dari Obrolan di Kafe. Tersedia psi.id. Diakses pada 2 Juni 2018
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit Alfabeta: Bandung
- Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta Selatan: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan